

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL DAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* TERHADAP
PENCEGAHAN KECURANGAN PADA PEMERINTAHAN
DESA DENGAN MORALITAS INDIVIDU
SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Empiris Pada Desa-Desa di Kecamatan Rambutan Kabupaten
Banyuasin)**

SKRIPSI



**Nama : Fadli Saputra M
NIM : 22 2017 137**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2021**

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL DAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* TERHADAP
PENCEGAHAN KECURANGAN PADA PEMERINTAHAN
DESA DENGAN MORALITAS INDIVIDU
SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Empiris Pada Desa-Desa di Kecamatan Rambutan Kabupaten
Banyuasin)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Akuntansi
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Nama : Fadli Saputra M
NIM : 22 2017 137**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2021**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fadli Saputra M
NIM : 22 2017 137
Konsentrasi : Pemeriksaan Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Pada Pemerintahan Desa Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi.

Dengan ini Saya Menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana sarta 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakan benaran dalam pertanyaan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Agustus 2021

A 5000 Rupiah Indonesian postage stamp is shown with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '5000', 'REPUBLIK INDONESIA', and 'METER POST'. The signature is in blue ink and appears to be 'Fadli Saputra M'.

Fadli Saputra M

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Pada Pemerintahan Desa Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi.

Nama : Fadli Saputra M
NIM : 22 2017 137
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Pemeriksaan Akuntansi

Diterima dan disahkan
Pada Tanggal, Juni 2021

Pembimbing I,



Dr. Betri, S.E.,AK., M.Si., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

Pembimbing II,



Darma Yanti,S.E.,AK.,MM,CA
NIDN/NBM : 0219057901/118712

Mengetahui,
Dekan
u.b Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Betri, S.E.,AK.,M.Si., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

MOTTO

“Wahai orang-orang beriman! Jika menolong (agama) Allah, niscaya dia akan menolong mu dan meneguhkan kedudukan mu”

(QS. Muhammad ; 7)

Ku persembahkan skripsi ini kepada

- 1. Mama dan papa tercinta*
- 2. Adek dan Abang*
- 3. Paman dan Tante*
- 4. Keluarga Besar Tersayang*
- 5. Dosen Pembimbing Ku*
- 6. Almamater Tercinta.*



PRAKATA

Alhamdulillahilahi robbil'alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-nya sehingga penulis skripsi yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) pada Pemerintahan Desa dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi”. Skripsi ini disusun sebagai syarat menyelesaikan jenjang Strata 1 (satu) guna meraih gelar sarjana pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis, bab metode penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan serta bab simpulan dan saran . Meski dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki, tetapi penulis yakin tanpa adanya saran, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak mungkin dapat tersusun sebagaimana mestinya.

Ucapan trimakasih penulis sampaikan kepada papaku Muhakko dan mamaku Itarli serta keluargaku dan bantuan memiliki makna besar dalam proses ini . Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Betri, S.E, AK., M. Si., CA dan Ibu Darma Yanti,S.E.,AK.,M,CA yang telah membimbing dan memberikan masukan guna menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H Abid Djazuli, S.E, M.M, selaku Rektor Universitas Muhammaiyyah Palembang beserta staf dan karyawan.
2. Bapak Yudha Mahrom DS, S.E, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan.
3. Bapak Dr.Betri, S.E., M.Si, CA, Ketua Program Studi Akuntansi dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak, Ibu dan seluruh staf pengajar, serta karyawan dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak, ibu pimpinan aparatur desa yang telah memberikan izin penelitian yang ada di Desa-Desa Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.
6. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Semoga Allah membalas budi baik atas seluruh bantuan yang diberikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca dan berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini, atas perhatian dan masukkan saya ucapkan terimakasih.

Palembang, Agustus 2021



Fadli Saputra M

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PRAKATA	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	
A. Landasan Teori.....	16
1. Teori Umum (<i>Grand Theory</i>)	16
a. Teori Atribusi (<i>Attribution Theory</i>).....	16
b. Teori Kontijensi (<i>Contijensi Theory</i>).....	17
2. Kompetensi Aparatur Desa	18
a. Definisi Kompetensi Aparatur Desa	18
b. Indikator Kompetensi Aparatur Desa.....	22
3. Sistem Pengendalian Internal	22
a. Definisi Sistem Pengendalian Internal	22
b. Indikator Sistem Pengendalian Internal	24
4. <i>Whistleblowing System</i>	26
a. Definisi <i>Whistleblowing System</i>	26
b. Indikator <i>Whistleblowing System</i>	27
5. Kecurangan (<i>Fraud</i>).....	28
a. Defenisi Kecurangan (<i>fraud</i>).....	28
b. Indikator Kecurangan (<i>Fraud</i>).....	30
6. Moralitas Individu	30
a. Defenisi Moralitas Individu	30
b. Indikator Moralitas Individu	31
B. Penelitian Sebelumnya	31
C. Kerangka Pemikiran.....	37
1. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, <i>Whistleblowing System</i> Bersama-sama terhadap Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>).....	37
2. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>).....	38

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>).....	39
4. Pengaruh <i>Whistleblowing System</i> terhadap Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>).....	40
5. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>) dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi	41
6. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Desa terhadap Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>) dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi.....	42
7. Pengaruh <i>Whistleblowing System</i> terhadap Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>) dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi	43
D. Hipotesis.....	46
1. Secara Bersama	46
2. Secara Parsial	46
3. Secara Moderasi	46
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Operasionalisasi Variabel.....	49
D. Populasi dan Sampel	50
E. Data Yang Diperlukan.....	53
F. Metode Pengumpulan Data	54
G. Analisis Data dan Teknik Analisis	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	70
1. Gambaran singkat tentang Desa-Desa di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin	70
2. Jawaban Responden	72
3. Statistik Deskriptif	75
4. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian.....	76
a. Variabel Kompetensi Aparatur Desa	77
b. Variabel Sistem Pengendalian Internal	80
c. Variabel <i>Whistleblowing System</i>	86
d. Variabel Moralitas Individu	89
e. Variabel Pencegahan Kecurangan.....	93
5. Hasil Pengelolaan Data	97
a. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Data.....	97
1) Uji Validitas	97
2) Reliabilitas	101
b. Uji Asumsi Klasik.....	102
c. Pengujian Hipotesis.....	106
d. Analisis regresi Linear Berganda dan <i>Moderated Regression Analysis</i>	111

B. Pembahasan Hasil Penelitian	122
1. Hasil Uji Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan <i>Whistleblowing System</i> terhadap Pencegahan Kecurangan	122
2. Hasil Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pencegahan Kecurangan	124
3. Hasil Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan	125
4. Hasil Pengaruh <i>Whistleblowing System</i> terhadap Pencegahan Kecurangan	127
5. Hasil Uji Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pencegahan Kecurangan yang dimoderasi Moralitas Individu	128
6. Hasil Uji Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan yang dimoderasi Moralitas Individu	129
7. Hasil Uji Pengaruh <i>Whistleblowing System</i> terhadap Pencegahan Kecurangan yang dimoderasi Moralitas Individu	131
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	133
B. Saran	134
DAFTAR PUSTAKA	135

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Survei Pendahuluan	11
Tabel II. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya	36
Tabel III. 1 Daftar Kantor Kepala Desa di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuwangi.....	48
Tabel III. 2 Operasionalisasi Variabel	49
Tabel III. 3 Jumlah Responden Aparatur Desa	52
Tabel IV. 1 Daftar Nama-nama Kantor Kepala Desa yang bersedia Menjadi Responden	71
Tabel IV. 2 Jumlah Responden Aparatur Desa	71
Tabel IV. 3 Hasil Total Jawaban Responden	74
Tabel IV. 4 Hasil Uji Deskriptif	75
Tabel IV. 5 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Sifat-Sifat Pribadi	77
Tabel IV. 6 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Keterampilan	78
Tabel IV. 7 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Pengetahuan	79
Tabel IV. 8 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Lingkungan Pengendalian	81
Tabel IV. 9 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Penilaian Risiko.....	82
Tabel IV. 10 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Kegiatan Pengendalian	83
Tabel IV. 11 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Informasi dan Komunikasi	84
Tabel IV. 12 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Pemantauan Pengendalian Internal	85

Tabel IV. 13 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner	
Indikator Anonimitas	86
Tabel IV. 14 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner	
Indikator Independen	87
Tabel IV. 15 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner	
Indikator Akses	88
Tabel IV. 16 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner	
Indikator Tindak Lanjut	89
Tabel IV. 17 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner	
Indikator Prokonvesional	90
Tabel IV. 18 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner	
Indikator Konvesional	91
Tabel IV. 19 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner	
Indikator Pasca-Konvesional	92
Tabel IV. 20 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner	
Indikator Manipulasi	93
Tabel IV. 21 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner	
Indikator Refrepresentasi	94
Tabel IV. 22 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner	
Indikator Salah Penerapan	96
Tabel IV. 23 Hasil Pengujian Validitas Variabel	
Kompetensi Aparatur Desa (X ₁)	98
Tabel IV. 24 Hasil Pengujian Validitas variabel	
Sistem Pengendalian Internal (X ₂)	99
Tabel IV. 25 Hasil Pengujian Validitas variabel	
<i>Whistleblowing System</i> (X ₃)	99
Tabel IV. 26 Hasil Pengujian Validitas variabel	
Moralitas Individu (Z)	100

Tabel IV. 27 Hasil Pengujian Validitas variabel Pencegahan Kecurangan (Y)	101
Tabel IV. 28 Hasil Pengujian Reliabilitas	102
Tabel IV. 29 Hasil Uji Normalitas	104
Tabel IV. 30 Hasil Pengujian Multikolinearitas	105
Tabel IV. 31 Hasil Koefisien Determinasi	107
Tabel IV. 32 Hasil Uji F	108
Tabel IV. 33 Hasil Uji t	109
Tabel IV. 34 Hasil Uji Regresi.....	112
Tabel IV. 35 Hasil Uji <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA) Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pencegahan Kecurangan yang dimoderasi Moralitas Individu	115
Tabel IV. 36 Hasil Uji <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA) Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pencegahan Kecurangan yang dimoderasi Moralitas Individu	115
Tabel IV. 37 Hasil Uji <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA) Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan yang dimoderasi Moralitas Individu	117
Tabel IV. 38 Hasil Uji <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA) Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pencegahan Kecurangan yang dimoderasi Moralitas Individu	118
Tabel IV. 39 Hasil Uji <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA) Pengaruh <i>Whistleblowing System</i> Pencegahan Kecurangan yang dimoderasi Moralitas Individu	120
Tabel IV. 40 Hasil Uji <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA) Pengaruh <i>Whistleblowing System</i> terhadap Pencegahan Kecurangan yang dimoderasi Moralitas Individu	120

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Kerangka Pemikiran	45
Gambar IV. 1 Hasil Output SPSS Uji Normalitas (Normal P-P Plot)	103
Gambar IV. 2 Hasil Output SPSS	106

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian

Lampiran 2 Kuesioner Penelitian

Lampiran 3 Hasil Kuesioner (Skala Ordinal)

Lampiran 4 Hasil Kuesioner (Skala Interval)

Lampiran 5 Tabel Uji Validitas, Reliabilitas dan Asumsi Klasik

Lampiran 6 Tabel Statistik

Lampiran 7 Fotokopi Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi

Lampiran 8 Fotokopi Surat Keterangan Riset dan Tempat Penelitian

Lampiran 9 Fotokopi Sertifikat Membaca dan Menghasal Al- Qur'an

Lampiran 10 Fotokopi Sertifikat SPSS

Lampiran 11 Fotokopi Sertifikat Aplikasi Komputer

Lampiran 12 Fotokopi Sertifikat Komputer Akuntansi

Lampiran 13 Fotokopi Plagiarism

Lampiran 14 Fotokopi Sertifikat Magang

Lampiran 15 Fotokopi Webinar KKN Mandiri

Lampiran 16 Biodata Penulis

ABSTRAK

Fadli Saputra M / 222017137 / 2021 / Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) pada Pemerintahan Desa dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Desa-Desa yang ada di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuwasin).

Rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) pada Pemerintahan Desa dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi. Tujuannya untuk mengetahui Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) pada Pemerintahan Desa dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi Pada Desa-Desa yang ada di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuwasin. Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan, kasi pelayanan, kaur keuangan, kaur tata usaha, dan kaur perencanaan. Sampel dalam penelitian ini adalah aparatur desa. Uji hipotesis yang digunakan adalah regresi linear berganda dan *moderated regression analysis*. Secara bersama-sama Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan *Whistleblowing System* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Hasil ini menunjukkan secara parsial Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, Sistem Pengendalian Internal dan *Whistleblowing System* tidak berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan. Dan secara moderasi, Moralitas Individu, merupakan homologiser moderasi, Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pencegahan Kecurangan, Moralitas Individu merupakan predictor moderasi Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan, Moralitas Individu merupakan predictor moderasi *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan Kecurangan.


Kata Kunci : Kompetensi, Sistem, *Whistleblowing System*, Moral, Pencegahan.

ABSTRACT

Fadli Saputra M / 222017137/2021 / Effect of Competence for Administrative Village, Internal Control Systems, and Whistleblowing System of the Prevention of Fraud (Fraud) on the Village Administration with Morality Individual As Variable Moderation (Empirical Study On Villages in Sub Rambutan Banyuasin).

The formulation in this research is how the influence of Administrative Competence Village, Internal Control Systems, and Whistleblowing System of the Prevention of Fraud (Fraud) on the Village Administration with Morality Individual Variable As Moderation. The goal is to determine the competence of Administrative Village, Internal Control Systems, and Whistleblowing System of the Prevention of Fraud (Fraud) on the Village Administration with Morality Individual Variable As Moderation In Villages in Sub Rambutan Banyuasin. This research includes associative research. The population used in this study were the village head, village secretary, head of government, head of welfare, head of service, head of finance, department of administration, and head of planning. The sample in this study is a questionnaire. The hypothesis test used is multiple linear regression and moderated regression analysis. Together, the Competence of the Village Apparatus, the Internal Control System, and the Whistleblowing System have a positive effect on fraud prevention. These results show partially that the Village Apparatus Competence has an effect on fraud prevention, the Internal Control System and the Whistleblowing System have no effect on Fraud Prevention. And in moderation, Individual Morality is a moderating homologist, Village Apparatus Competence on Fraud Prevention, Individual Morality is a moderating predictor of the Internal Control System for Fraud Prevention, Individual Morality is a moderating predictor of the Whistleblowing System for Fraud Prevention.

Keywords: Competence, System, Whistleblowing System, Moral, Prevention.

NO	NAMA	NIM	KETERANGAN
A126	Fadli Saputra M	222017137	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu upaya negara untuk memperkecil ketimpangan sosial dengan membuat aturan tentang implementasi agar pelayanan kepada masyarakat tepat sasaran dan jalannya program pemerintah baik yang bersifat administrasi maupun keuangan sejalan dengan semangat untuk memperbaiki kesejahteraan serta kualitas penduduk desa. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, desa diberikan wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dasar aturan hukum dan pemberian wewenang tersebut, maka dibentuklah pemerintahan desa sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya desa dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan desa yang bertujuan untuk memperdayakan desa.

Pemerintahan pusat memberikan alokasi anggaran kepada desa dalam bentuk dana desa untuk meningkatkan anggaran pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah telah mengucurkan dana yang cukup besar setiap tahunnya untuk diberikan kepada desa.

Dana desa yang diberikan pemerintah untuk desa, pemerintah telah mempersiapkan peraturan agar dana desa yang diberikan dapat dikelola dan dipertanggung jawab dengan baik. Terdapat peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 membahas dana desa yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri dalam negeri RI No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur tentang pengelolaan dana desa.

Fraud bisa dianalogikan dengan penyakit, karena lebih baik di cegah dari pada diobati. Jika menunggu terjadinya *fraud* baru ditangani itu artinya sudah ada kerugian yang terjadi dan telah dinikmati oleh pihak-pihak tertentu, bandingkan bila kita berhasil mencegahnya, tentu kerugian belum semuanya beralih ke pelaku *Fraud* tersebut. Dan bila *fraud* sudah terjadi maka biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar untuk memulihkannya dari pada melakukan pencegahan sejak dini. (Fitrawansyah, 2014 dalam romadaniati 2020).

Fraud (kecurangan) merupakan penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak-pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan itu sendiri secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan luar organisasi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang secara langsung

merugikan orang lain.

Pencegahan *Fraud* (kecurangan) merupakan suatu tindakan upaya untuk mencegah atau menahan agar seseorang tidak melakukan perbuatan kecurangan yang bersifat dapat merugikan. Pencegahan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan adanya kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal dan juga menerapkan *whistleblowing system* kepada karyawan atau perangkat desa dan juga menambahkan moralitas setiap individu.

Menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 Kompetensi aparatur desa adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang Pegawai Aparatur, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Aparatur tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara professional, efektif dan efisien. (Pemedagri, 2017). Kompetensi dapat dijelaskan sebagai kemampuan seseorang, lembaga dan masyarakat untuk melakukan keberhasilan, untuk mengidentifikasi dan mencapai tujuan. Aparatur desa merupakan faktor yang paling penting untuk menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dibebankan kepadanya. Dimensi peningkatan kompetensi aparatur desa mencakup penguasaan pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang diperoleh melalui pendidikan, latihan, belajar dan pengalaman.

Sistem pengendalian internal adalah suatu cara mengawasi, mengarahkan serta mengukur sumber daya suatu lembaga dan memiliki peran yang penting di dalam pencegahan dan pendeteksi adanya tindakan kecurangan dientitas tersebut. Menurut PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP mengenai sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penerapan *Whistleblowing system* dengan baik oleh pegawai diperlukan dalam pencegahan kecurangan, menurut Alfian et al., (2018). *Whistleblowing system* dapat didefenisikan sebagai suatu pengungkapan oleh karyawan mengenai suatu informasi yang diyakini mengandung pelanggaran hukum, peraturan, pedoman praktis, pernyataan professional, atau berkaitan dengan Kesalahan prosedur, korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau membahayakan publik dan keselamatan tempat kerja. Menurut Nugroho (2015) sistem pelaporan pelanggaran atau yang biasa disebut *whistleblowing system* adalah wadah bagi seorang *whistleblowing* untuk mengadukan kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal organisasi. Penanganan *Whistleblowing* yang baik diharapkan akan menambah kesadaran bahwa pegawai pemerintah harus terus menjaga integritasnya. Karena jika tidak, akan ada *whistleblower* yang akan mengungkapkan penyimpangan

integritas mereka dalam menjalankan tugas dan berakibat pada penjatuhan sanksi hukuman tanpa memandang bulu. Dengan diterapkannya *whistleblowing system* diharapkan dapat menciptakan aparatur negara yang bersih, profesional dan bertanggung jawab (Kementerian Keuangan, 2013).

Menanamkan Moralitas setiap individu sangat diperlukan dalam pencegahan kecurangan, Dwi et al., (2017) menyatakan bahwa moral manusia dapat dilihat dari kepribadian dan pola pikir mereka yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan, pola pikir ini akan mengurangi rasa ingin melakukan kecurangan.

Penelitian ini menggunakan moralitas individu sebagai variabel moderating. Moralitas individu juga berperan penting dalam kesalahan kecurangan (*fraud*) yang cenderung masih sering terjadi di pemerintahan desa. Moral merupakan hal yang sesuai dengan keyakinan umum yang diterima masyarakat, berkaitan dengan penilaian norma tindakan manusia. Semakin tinggi level penalaran moral individu, maka akan semakin tinggi kecenderungan untuk tidak melakukan kecurangan (*fraud*) (Dennyningrat dan Saputra, 2018). Moralitas dapat diartikan sebagai kualitas yang menjunjung baik atau buruknya sikap atau perbuatan seseorang. Seseorang dikatakan bermoral apabila memiliki daya tarik untuk berperilaku baik yang memiliki nilai positif dalam penilaian masyarakat setempat. Seseorang yang tidak memiliki moral cenderung akan melakukan tindakan atau perbuatan untuk melakukan kecurangan yang akan merugikan bahkan membahayakan orang lain (Tarigan, 2016).

Penelitian yang dilakukan Wahyuni Nova (2019), Atmadja dan Saputra (2017), Eldayanti (2020), Rahmawaty (2015), Basirrudin dan Amin (2014), dan Munti dkk (2017) menyatakan bahwa Kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan Kecurangan, berbeda pendapat dengan Anisykurillsh Wardianti (2018), Hendriani (2013), Widyatama, dkk (2017), Inapty dan Martiningsih (2015), dan Indriani et al., (2018), dan Herman dan Mahdi (2020) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap kecurangan.

Penelitian yang dilakukan Devi dkk, (2020), Josephn et al., (2015), Nisak dkk (2013), Atmadja dan Saputra (2017), Purwitasari (2013), Laksmi dan Sujana (2019), Hermiyeti (2008), menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa, berbeda pendapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Usman et al., (2015), Wonar et al., (2018), menyatakan bahwa tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Penelitian yang dilakukan Wahyuni Nova (2019) Adi Kusuma (2017), Trisna (2017), Kadek Widiyarta (2017), Siska Agusyani (2016), dan Metta Gaurina (2017) menyatakan bahwa *Whistleblowing Ayatem* Berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan, berbeda pendapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Titaheluw (2011), dalam Endang (2018), dan Ary (2019) menyatakan bahwa *Whistleblowing System* tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Penelitian yang dilakukan Wardana et al., (2017), Setiawan (2018), Aranta (2013), Puspasari dkk, (2015), Laksmi dan Sujana (2019), dan Rahimah et al., (2018) menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh terhadap kecurangan, berbeda pendapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al., (2017), Ade (2017), Puspasari dkk (2015), menyatakan bahwa moralitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Fenomena kasus pengelolaan keuangan dana desa banyak terjadi di Indonesia. Hasil pemantauan yang dilakukan oleh Indonesia *corruption watch* (ICW,2018) telah mengawasi tindakan korupsi yang terjadi di desa. Hasil pemantauan ICW, pada tahun 2015-2017 kasus tindak pidana korupsi di desa semakin meningkat. Kasus korupsi mencapai 17 kasus pada tahun 2015 dan melonjak menjadi 41 kasus pada tahun 2016. Peningkatan yang sangat signifikan terjadi di tahun 2017 dengan 96 kasus. Sehingga seluruh kasus korupsi yang teridentifikasi berjumlah 154 kasus.

Terdapat 154 kasus korupsi tersebut, tidak semuanya adalah kasus korupsi yang melibatkan APBDes. Jumlah kasus dengan objek APBDes berjumlah 127 kasus, sementara berturut-turut terdapat 27 kasus dengan objek bukan anggaran desa atau total 18% dari jumlah kasus. Pemungutan liar yang dilakukan aparat desa merupakan kasus dengan objek selain APBDes. Sedangkan kasus terkait APBDes yang dikorupsi terdiri dari korupsi alokasi dana Desa (ADD), Dana Desa, Kas Desa dan lain-lain. Berbagai macam modus dilakukan oleh pelaku korupsi di pemerintahan desa, sebagai besar merupakan praktik penyalahgunaan anggaran sebanyak 51 kasus, 32 kasus

penggelapan, laporan fiktif dengan 17 kasus, kegiatan atau proyek fiktif 15 kasus dan sebanyak 14 kasus pembengkakan anggaran. Melonjaknya korupsi di sektor desa menggambarkan catatan buruk yang berkaitan erat dengan pembahasan evaluasi kebijakan pemerintahan untuk desa. Seluruh kasus korupsi tersebut mensyaratkan bahwa desa yang diyakini menjadi bagian dari pembangunan sampai detik ini menjadi ladang korupsi baru.

Fenomena yang terjadi di Daerah Sumatera Selatan seorang tersangka korupsi dana Desa di Desa Arisan Gading, Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2018. Tersangka Jon (42) mantan kades periode 2013-2019 yang diduga korupsi dana desa sekitar Rp 641 juta itu diamankan tim Subdit Tipikor Polda Sumsel dari tempat persembunyiannya di Jakarta. Dia menjelaskan kronologis pengungkapan kasus tersebut bermula ditemukan adanya perbuatan melawan hukum penyimpangan dana pembangunan fisik dua kegiatan tidak sesuai volume. Kedua pekerjaan itu yakni pembangunan jalan rabat beton dusun I, II dengan volume $390 \times 1.50 \times 0.15$ di Desa Arisan Gading, Indralaya Selatan, serta pembangunan jalan rabat beton dusun I, II dengan volume $300 \times 3.50 \times 0.15$.

Penggelapan dana kegiatan BUMDes sebesar Rp 50 juta yang seharusnya untuk pembelian tenda diambil oleh mantan Kades Arisan Gading diduga untuk keperluan pribadi. Tersangka memanipulasi dokumen laporan pertanggung jawaban keuangan baik dana desa, alokasi dana desa maupun siltap, berupa tanda tangan penerima yang namanya tercantum di laporan tersebut. Padahal tidak pernah menandatangani dokumen itu dan tidak pernah

menerima uang seluruh atau sebagian.

Dia menjelaskan, Desa Arisan Gading, Kecamatan Indralaya Selatan, Ogan Ilir memperoleh dana APBdes Tahun Anggaran 2018 dan telah ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening Kas Desa (RKD) Rp 1.107.930.000 terdiri atas dana desa sumber APBN sebesar Rp 689.347.000 dan alokasi dana desa sumber APBD Kabupaten Ogan Ilir sebesar Rp 348.083.000. Perbuatan tersangka tersebut melanggar Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang pembarantasan tindak pidana korupsi yang diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001. Sesuai UU tersebut penyidik menetapkan pasal yang dipersangkakan kepada Jon mantan kades Arisan Gading yakni Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta didenda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar (Antara New.Com)

Hal yang terjadi di pemerintahan Kabupaten Biak Numfor, melakukan evaluasi terhadap penyalahan Dana Desa tahap pertama sebesar 60% untuk tahun 2017. Untuk pencairan Dana Desa tahap pertama sebesar 60% sudah dipergunakan kepala kampung sebagai pengguna anggaran, Kata Asisten I Sekda Biak, I Putu Wiadnyana di Biak. Menurutnya, berdasarkan pengawasan yang dilakukan di lapangan selama proses pencairan tahap pertama, pemanfaatan dan penggunaannya telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa yang mendapatkan dana alokasi tersebut (Koreri.com). Namun sebanyak 203 kampung di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua,

belum menyerahkan laporan pertanggung jawaban dana desa tahap pertama sebesar 60%. Sesuai data yang masuk LPJ dana desa dari keseluruhan sebanyak 54 kampung, yang sisanya sampai saat ini Pemkab Biak Numfor masih menanti pelaporannya, ujar Pelaksana tugas Bupati Biak Herry Ario Naap di Biak. Ia mengatakan setiap kampung menerima kucuran dan desa pada tahun 2017 sebesar Rp 720 juta dengan pencairan dua tahap dan bagi kampung yang sudah menyerahkan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa tahap pertama yang akan menerima pencairan dana desa tahap kedua. Keterlambatan laporan pertanggung jawaban disebabkan karena kurang pahamnya aparaturnya tentang laporan pertanggung jawaban yang merupakan syarat pencairan tahap berikutnya.

Kasus selanjutnya yang terjadi di Bone, Sulawesi Selatan. Seorang kepala desa di Bone, yang bernama Ardi (31) ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana desa. Tindak korupsi tersebut diduga dilakukan pada tahun anggaran 2017 hingga 2018. Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari Tim Audit Inspektorat Daerah Pemkab Bone diperoleh total kerugian negara senilai Rp 330.660.613. Kasus korupsi dana desa di Desa Tondong ini tersangka Ardi sengaja tidak menyerahkan seluruh dana desa sesuai yang ada pada Pagu Anggaran di APBDes kepada pelaksana kegiatan, tetapi Ardi memerintahkan untuk membuat laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan Dana desa (DD) yang tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada di lapangan alias Fiktif. (news. Detik. com).

Tabel 1.1
Survei Pendahuluan

Kantor Kepala Desa di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin	Hasil Survei Pendahuluan
Kantor Kepala Desa Sako di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. (Jl. Palembang SP. Padang KM. 19 Desa Sako Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin).	Berdasarkan hasil pengamatan dan survei yang dilakukan pada Kantor Desa Sako, bahwasanya desa sako telah menerapkan <i>whistleblowing system</i> dikantor kepala desa sako, seperti halnya kotak saran yang terdapat di luar kantor kepala desa sako dan juga pelaporan dalam bentuk penempelan benner didepan kantor desa tersebut dengan adanya beberapa himbauan sistem pelaporan pelanggran tersebut sudah cukup bagi kantor desa sako mencegah atau meminimalisir terjadinya kecurangan karena <i>whistleblowing system</i> sangat dipergunakan didalam terjadinya kecurangan dilakukan aparatur desa tersebut akan tetapi didesa sako terkait sistem pengendalian internal yang ada sudah baik, akan tetapi belum maksimal sistem yang ada yang dipakai oleh pegawai/staff belum sesuai dengan kemampuan dan masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh aparatur desa dalam mengawasi kinerja dari pegawai desa. Begitu juga dengan kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa dan karyawan merupakan masih ada lulusan SMA, sehingga sering kali terdapat kesulitan karyawan dalam mengoperasikan komputer.
Kantor Kepala Desa Sungai Pinang di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. (Jl. Kapten Robani Kadir No. RT. 19, Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin)	Hasil pengamatan dan survei yang dilakukan pada Kantor Kepala Desa Sungai Pinang Bahwa sistem pengendalian internal belum dilaksanakan secara maksimal hal ini dikarenakan belum maksimalnya dalam melakukan pengawasan dan masih sering terjadi tidak tepatan dalam menyampaikan informasi antara kepala desa dengan karyawan yang ada dikantor tersebut. Selain itu dalam pelaksanaan aparatur desa lebih menekankan pada sifat-sifat yang dimiliki oleh aparatur yaitu sifat kejujuran atau juga moralitas dengan harapan untuk membantu meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh setiap aparatur, sedangkan <i>whistleblowing system</i> didesa sungai pinnag sudah ada tapi belum begitu maksimal diterpakna diarea kantor tersebut.
Kantor Kepala Desa Pangkalan Gelebak Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. (Jl. Jamparing Dusun 1 RT 2, Desa Pangkalan Gelebak, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin)	Berdasarkan hasil pengamatan dan survei yang dilakukan pada Kantor Kepala Desa Pangkalan Gelebak bahwa kompetensi aparatur desa masih belum begitu maksimal dalam penerapannya terhadap karyawan-karyawan atau staff yang ada dikantor kepala desa tersebut. Selain itu sistem pengendalian internal yang sudah dimiliki belum maksimal digunakan seperti penginputan data-data setiap warga masih ada kendala dalam penginputan tersebut sehingga menjadi kertelambatan dalam hal tersebut.

Sumber : Penulis, 2021

Berdasarkan hasil survei pendahuluan dari ketiga kantor kepala desa tersebut terdapat masih ada desa yang memiliki sistem pengendalian internal yang lemah karena belum terbaginya posisi karyawan yang sesuai dengan kemampuan karyawan yang bekerja pada kantor kepala desa tersebut dan masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh aparatur desa dalam mengawasi kinerja staff desa.

Hal ini tentunya dikarenakan oleh banyak faktor, diantaranya adalah kemampuan dari aparatur pemerintahan desa itu sendiri, seperti tingkat pendidikan formal atau juga pendidikan non-formal. Dalam mencapai tujuan bersama maka aparatur desa yang ada di Kecamatan Rambutan harusnya mempunyai keahlian yang cukup baik dalam memenuhi kewajibannya, maka sangat diperlukan dalam meningkatkan keterampilan dan keahlian dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut sangat dibutuhkan aparatur desa yang benar-benar bisa bertanggung jawab dan memahami dari bidang yang dijalankannya. Maka, baik kepala desa atau pun staff dapat meningkatkan kualitas kinerjanya dengan melakukan pelatihan-pelatihan guna menciptakan kinerja yang baik. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan bahwa kompetensi aparatur desa di Kecamatan Rambutan itu belum sesuai dengan yang diinginkan.

Berdasarkan pada uraian diatas maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal dan *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) pada Pemerintahan Desa Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan Kecurangan ?
2. Bagaimana Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pencegahan Kecurangan ?
3. Bagaimana Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan ?
4. Bagaimana Pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan Kecurangan ?
5. Bagaimana Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pencegahan Kecurangan yang dimoderasi oleh Moralitas Individu ?
6. Bagaimana Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pencegahan Kecurangan yang dimoderasi oleh Moralitas Individu ?
7. Bagaimana Pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan Kecurangan yang dimoderasi oleh Moralitas Individu ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menguji Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan Kecurangan.
2. Untuk menguji Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pencegahan Kecurangan.
3. Untuk menguji Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan.
4. Untuk menguji Pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan Kecurangan.
5. Untuk menguji Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pencegahan Kecurangan yang dimoderasi oleh Moralitas Individu
6. Untuk menguji Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan yang dimoderasi oleh Moralitas Individu
7. Untuk menguji Pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan Kecurangan yang dimoderasi oleh Moralitas Individu.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan untuk pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi untuk menambah wawasan mengenai pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pada pemerintahan desa dengan moralitas individu sebagai variabel moderasi.

2. Bagi Aparatur Desa

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat kepada aparatur desa di Indonesia khususnya mengenai pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan *fraud* pada pemerintahan desa dengan moralitas individu sebagai variabel moderasi.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini di harapkan dapat dipegunakan sebaik-baiknya oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai referensi maupun sebagai bahan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade. (2017). Pengaruh Ketaatan Akuntansi, Moralitas Dan Motivasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Di Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.
- Alfian, Subhan, Rahayu. (2018). Penerapan *Whistleblowing System* dan *Surprise Audit* Sebagai Strategi Anti *Fraud* Dalam Industri Perbankan. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 8(2): h: 1-8.
- Anisykurlillah, & Wardianti. (2018). Analisis Moralitas Individu Dalam Memoderasi Determinan Kecurangan Akuntansi.
- Aranta, P.Z. (2013). Pengaruh Moralitas Aparat Dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pemerintahan Kota Sawahlunto). *Jurnal Akuntansi*, 1 (1), 160. [https:// doi.org/ 10.1017/ CBO9781107415324.004](https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004).
- Arfan Ikhsan Lubis. (2019). *Akuntansi Keperilakukan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ary Trisno (2019). Pengaruh *Whistleblowing System*, *Internal Auditor Professionalisme* dan *Red Flags Method* Terhadap Pencegahan Kecurangan Akuntansi Dengan *Ethical Enviroment* Sebagai Variabel Moderasi. Skripsi UIN Allaudin Makasar.
- Association Of Certified Fraud Examiners*. (2012). *Report To The Nations 2012 Global Fraud Study Letter From The President & CEO*.
- Atmadja, A. T. dan Saputra, A. K. (2017) "Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Desa," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 1, hal, 7. Doi: 10.24843/jiab. 2017.. v 12.i01.p02.
- Basirrudin, M., & Amin, M. R. (2014). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Meranti Tahun 2012. *Jom FISIP*, 1(2), 1-11.
- Betri, (2020). *Pemeriksaan Manajemen*. Edisi Sepuluh, Penerbit CV Amanah. Palembang.
- Betri, (2018). *Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif*. Edisi Satu, Palembang.
- Dennyningrat, I Gusti Agung Gede dan I D.G. Dharma Suputra. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan dan Moralitas Individu Pada Kesalahan Akuntansi. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(2):

1170-1196.

- Dewi, Putu Fenny Kharima, G. A. Y. Dan Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Moralitas, Integritas, Komitmen Organisasi, dan Pengendalian Internal Kas Terhadap Pencegahan Keurangan (*Fraud*) dalam Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Studi Pada Desa di Kabupaten Buleleng). *E-Journal S1 AK Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Dwi Ariastini, Yuniarti, Kurniawan. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, *Proactive Fraud Audit dan Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud* Pada Pengelolaan Dana Bos Se-Kabupaten Klukung. *E-Journal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2): h: 1-10.
- Diaz Priantara. (2013). *Fraud Auditing & Investigasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Elias. (2008). *Auditing Student Professional Commitment and Anticipatory Socialization and Their Relationship to Whistleblowing Managerial Auditing Journal*, Vol. 23, No. 3, Hal: 283-294.
- Endang Sri Wahyuni dan Tiara Nova. (2018). *Analisis Whistleblowing System dan Kompetensi Aparatur terhadap Pencegahan Fraud*. (Studi Empiris pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Inovasi dan Bisnis* (Vol.6. 2018. 189-194).
- Fitrawansyah. (2014). *Fraud & Auditing*. Jakarta: Mitra Wacana Media. Fikri, Ali, Biana Adha Inapty, dan Rr. Sri Pancawati Martiningsih. (2015). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada SKPD-SKPD di Pemprov. NTB). *Simposium Nasional Akuntansi XVIII*, Medan.
- Gaurina, Purnawati, dan Anantawikrama. Pengaruh Persepsi Karyawan mengenai Perilaku Etis dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud* pada Bali Hai Cruises. *E-Journal SIAK* (Vol. 8 No. 2 Tahun 2017).
- Ghozali H. Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamdani. (2016). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Salemba Empat.

- Herman dan Mahdi (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud*, dengan Kecerdasan Spritual Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Aparat Pemerintahan Desa Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat). Vol. VI No. 2 Desember 2020 Page 184-198.
- Hermiyett. (2008). Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang. STEKPI Jakarta.
- Hoffman, W. Michael dan Robert E. (2008). *A Business Ethics Theory of Whistleblowing*. *Journal of Business and Environmental Ethics*. Vol. 12, No. *, Hal: 45-59.
- I Gede Adi Kusuma Wardan, Edy Sujana, dan Made Arie Wahyuni. Pengaruh Pengendalian Internal, *Whistleblowing System* dan Moralitas Aparat terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) pada Pengelolaan Keuangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. E-Journal S1 Ak (Vol. 6 No.: 3 Tahun 2016).
- I Made Hangga Hariawan, Ini Komang Sumandi, Ini Wayan Alit Erlinawati. (2020). Pengaruh Kompetensi Daya Manusia, *Whistleblowing System*, dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Keuangan Desa.
- Indayani, Fitri, L, dan R.R.G. (2018). *The Effect of Village Characteristics Toward Village Finance Efficiency In Lampung, Indonesia*. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 7(4), 93-99.
- Ini Kadek, Rai Eldayanti, Sang Ayu, Putu Arie Indraswarawati, Ini Wayan Yuniasih. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur desa, Sistem Pengendalian Internal, Integritas dan Akuntabilitas terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Keuangan Desa.
- Joseph, O. N. O. A dan J. B. (2015). *Effect of Internal Control On Fraud Detection and Prevention in District Treasuries of Kakamega Country*. *Internasional Journal of Business and Management Invention*, 4 (1), 47-57
- Junia. (2016). Pengaruh Moralitas Aparat, Kesesuaian Kompensasi, dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar).
- Laksmi, & Sujana. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

- Mahmud. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mark F. Zimbelman, Conan C. Albrecht, W. Steve Albert, & Chad O. Albert. (2014). *Akuntansi Forensik. (edisi 4)*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Mouallem, L. El, & Analoui, F. (2014). *The Need For Capacity Building In Human Resource Management Related Issues: A Case Study From The Middle East (Lebanon)*. *European Scientific Journal*, 1 (June), 245-254.
- Mulyadi. (2014). *Sistem Akuntansi. (edisi 3)*. Jagakarsa: Salemba Empat. Munti, F., & Fahlevi, H. (2017). Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh. *Akuntansi dan Investasi*, 18 (2), 172-182. <https://doi.org/10.18196/jai.18028>.
- Ni Kadek Siska Agusyani, Edy Sujana, dan Made Arie Wahyuni. (2016). Pengaruh *Whistleblowing System* dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pencegahan *Fraud* pada Pengelolaan Keuangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. *E- Journal S1 Ak (Vol. 6 No.:3 Tahun 2016)*.
- Nisak, C., Fitri, P., & Kurniawan, A. (2013). Sistem Pengendalian Internal dalam Pencegahan *Fraud* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Kabupaten Bangkalan. *JAFFA*, 01(1), 15-22.
- Nova & Wahyuni. (2018). Analisis *Whistleblowing System* dan Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan *Fraud*. *Jurnal Inovasi dan Bisnis* (6) 189-194.
- Nugroho, Vredy Octaviari. (2015). Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai *Whistleblowing System* Terhadap *Fraud* dengan Perilaku Etis Sebagai Variabel *Intervening*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negri Yogyakarta.
- Nurlina T. Muhyiddin, M. Irfan Tarmizi, dan Anna Yulianita. (2017). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan sosial: Teori, Konsep, dan Rencana Proposal*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Purwitasari, Anggit. (2013). Pengaruh Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi dalam Pencegahan Kecurangan (*Fraud*). Pengadaan Barang (Survei pada 5 Rumah Sakit di Bandung). Skripsi Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama Bandung.
- Puspasari, N., & Suwardi, E. (2015). Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Intenal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi, 1-30. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415425.004>.

- Puspasari, Novita, & Meutia Karunia Dewi. (2015). Pengaruh Penalaran Moral Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Tekanan Situasional terhadap Kecenderungan Melakukan *Fraud* saat Mengaudit: Sebuah Studi Eksperimen. Simposium Nasional Akuntansi XVIII, Medan.
- Putra Widhu. (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok: Rajawali.
- Rahimah, Murni, & Lysandra. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan *Fraud* yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- Rahmawaty, Sri. (2015). Pengaruh Komitmen Aparatur Fungsional dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara). Skripsi, Universitas Halu Oleo.
- Robbins, Stephen P dan Timothy A. Judge. (2017). *Perilaku Organisasi* Ed. 16. Jakarta: Salemba Empat.
- Salam, Burhanudin. (2000). *Etika Individu (Pola Dasar Filsafat Moral)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Setiawan, S. (2018). *The Effect of Internal Control and Individual Morality on The Tendency of Accounting Fraud*. *Asia Pacific Fraud Journal*, 3(1), 33-41. <https://doi.org/10.21532/apfj.001.18.03.01.04>.
- Siti Sarah, Taufeni Taufik, Devi Safitri. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Indragiri Hulu. Vol 4 No. 4, Desember 2020 (330-342) e-ISSN: 2685-5607.
- Soemarso Slamet Raharjo. (2019). *Etika Dalam Bisnis & Profesi Akuntan dan tata Kelola Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Syiful Bahri. (2018). *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: ANDL.
- Tarigan, Laurensia Br. (2016). Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi, Efektivitas Pengendalian Internal dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *JomFekon*, 3(1): 896-909.
- Trisna Wulandari (2017). Pengaruh Budaya Organisasi, Peran Auditor Internal dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan Kecurangan. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah.

- Usman, B. A. U. T. T. Dan M. R. (2015). Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi pada SKPD Pemerintah Kabupaten IndragiriHilir). *Jurnal Ekonomi*, 23, 18-34.
- V. Wiratna Sujarweni. (2019). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- V. Wiratna Sujarweni. (2019). *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- V. Wiratna Surjaweni. (2019). *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Wahyuni, E. S. Dan Nova, T. (2019). *Analisis Whistleblowing System dan Kompetensi Aparatur terhadap Pencegahan Farud, Inovbiz*. *Jurnal Inovasi Bisnis*, 6(2), Hal. 189. Doi:10.35314/inovbiz.v6i2.867.
- Wardana, I Gede Adi Kusuma, E. S. Dan M. A. W. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal, *Whistleblowing System* dan Moralitas Aparatur Terhadap Pencegahan *Fraud* pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng. *E-Journal S1. Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8.
- Wibowo. (2016). *Budaya Organisasi. (edisi 4)*. Depok: Pustaka Rajawalin Pers.
- Wibowo. (2018). *Budaya Organisasi. (edisi 5)*. Depok. Pustaka Rajawalin Pers.
- Widyatama, Arif, Lola Novita, dan Diarespita. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Anggaran Dana Desa (ADD). *Jurnal BAKI Vol. 02. No. 02: 1-20*.
- Wonar, Falah, & Pangyow. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan *Fraud* dengan *Moral Sensitivity* Sebagai Variabel Moderasi.
- Zimbelman, Mark F (2014). *Akuntansi Forensik*. Cetakan Keempat. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.